

## Analisis Manajemen Desa Terhadap Pembangunan

**Karolus W. Rato, Lidia Ambu Kaka, Adriana Ghadi, Marianus Putra Bili, Maria Febrianti H. Hangga**

Teknik Informatika, Universitas Stimikom Stella Maris Sumba (Unmaris),  
[lindawarat2@mail.com](mailto:lindawarat2@mail.com), [ostihangga@gmail.com](mailto:ostihangga@gmail.com), [PutraBili2011@gmail.com](mailto:PutraBili2011@gmail.com), [Arlin Ghadi@gmail.com](mailto:Arlin Ghadi@gmail.com)

**Alamat:** Radamata, Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur  
*Korespondensi Penulis:* [lindawarat2@mail.com](mailto:lindawarat2@mail.com)

**Abstract.** *Problems In development, village communities still have very significant problems. First, in terms of improvements, the improvements are because they are included in urban areas, while in general, our nation Indonesia, is still covered by rural areas. At that time, in the middle of the government. The New Order, various arrangements and programs for the improvement of the province were prepared, but it was clearly ready to see that the socio-economic conditions of rural communities were still very far from what was expected. The purpose of this research is to find out what the village government does in village management for development. To find out the factors that affect village management. methods used in the research, research results, conclusions, suggestions, and research implications.*

**Keywords:** *Village development, development problems, urban areas*

**Abstrak.** Masalah Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan. Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini ialah **tujuan** penelitian penelitian ini ialah Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam Menejemen desa terhadap pembangunan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Menejemen desa. **Metode** yang digunakan dalam penelitian, **hasil** penelitian, **kesimpulan**, **saran**, dan **implikasi** penelitian.

**Kata Kunci :** Pembangunan desa, Masalah pembangunan, Kawasan perkotaan

### PENDAHULUAN

Masalah Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan. Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Pembangunan pedesaan ataupun desa bisa dikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah

Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga

kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan.

Dalam rangka membangun landasan yang kokoh bagi demokrasi, partisipasi rakyat pembangunan yang adil dan merata, dengan tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah dan legislatif mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 terkait Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur penting dari kedua undang-undang tersebut ialah kewenangan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) wajib lebih akuntabel kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, merumuskan kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang sejati serta bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah menjalankan usaha sendiri dalam keadaan yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan karakteristik daerah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yakni untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian ADD termasuk bentuk perwujudan hak desa untuk pelaksanaan otonomi desa. ADD berasal dari bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima masing-masing kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Target ADD adalah seluruh desa setempat. Tujuan ADD 30% adalah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan memperkuat peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% mendukung rencana pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil sebagaimana dari orientasi pencapaian pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa setiap desa diberikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri baik kewenangan mengenai hal asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten sesuai perundang-undangan yang berlaku. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil kemampuan keuangan antar desa dalam menyediakan dana bagi keperluan desa untuk pelaksanaan pemerintahan serta penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. ADD adalah memperoleh bagian keuangan desa dari daerah yang dialokasikan

melalui kas desa. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa ini bisa mendorong terlaksananya pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk cara memberdayakan masyarakat desa dan menjaga peningkatan ekonomi di tingkat desa. Hadirnya Alokasi Dana Desa, desa mempunyai kepastian pembiayaan maka perbaikan bisa dilanjutkan tanpa perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Salah satu program saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10 tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun perlu kita pahami bahwa dalam hal tujuan tersebut pengelolaan dana desa efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kfabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara efektif dalam pengelolaan dana desa yang mempunyai salah satu tujuan juga untuk pengembangan sumber daya desa dan masyarakat desa pada umumnya.

penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan.

Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan. Berdasarkan pada hal ini dana desa yang sudah sepatutnya menjadi modal bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk memajukan kehidupan masyarakat desa dalam aspek.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kasual komparatif (*Casual Comparative Research*). Populasi penelitian ini para aparat DESA RADAMATA. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *non-probability sampling* dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini

digunakan untuk melihat gambaran Analisis manajemen desa terhadap pembangunan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang disyaratkan. Kriteria yang diambil yaitu: masa jabatan aparat desa minimal satu tahun maksimal 5 tahun. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan *Self- Administered Surveys* yaitu data di kumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung. Kuesioner dibagikan secara personal kepada masing-masing aparat desa radamata. Dengan demikian, data yang diperoleh adalah data primer karena berasal dari sumber data langsung (responden).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada DESA RADAMATA dengan tema ANALISIS MANAJEMEN . Berdasarkan Jenis Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif DESA TERHADAP PEMBANGUNAN yaitu data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Sedangkan berdasarkan sumbernya penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri.

### **Populasi dan sampel**

Populasi adalah wilayah generasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan adapun jumlah tenaga di DESA RADAMATA. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 27 semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat dilakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif

## **KESIMPULAN**

Bagian kesimpulan berisitentang 1) sajian **kesimpulan** hasil penelitian, dan 2) **implikasi**, 3) **keterbatasan** penelitian, dan 4) **saran**. Kesimpulan tidak sekadar mengulangi data, tetapi berupa substansi pemaknaan. Bagian kesimpulan dapat berupa pernyataan tentang apa yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan dalam bab "Pendahuluan" yang akhirnya dapat menghasilkan bab "Hasil dan Pembahasan" sehingga ada kompatibilitas dan korelasi. Selain

itu, dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek aplikasi penelitian selanjutnya ke depan (berdasarkan hasil dan pembahasan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1).*

astuti, p. b. (2013). efektivitas dan pengaruh pnpm mandiri perdesaan, alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan jumlah penduduk terhadap jumlah kepala keluarga miskin.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Penggunaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa : Jakarta

*Bidin, m. Z. (2015). Tinjauan Yogyakarta:mitra. Pustaka nurani. Chambers, robert. 1987 Analisis manajemen dana desa terhadap pembangunan.*